



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. ALI KUNCORO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **829748**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/60 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1282 m2/800 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 742 m2/250 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 82.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, VESPA ZIP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, VESPA SPINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 82.595.509****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 3.864.595.509****III. HUTANG****Rp. 2.080.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.784.595.509

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.